

Peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Sebuah Studi *Systematic Literature Review*

The Role of Regional Public Service Agencies (BLUD) in the Financial Management of Vocational High Schools (SMK): A Systematic Literature Review Study

Fuad Iskandar¹, Hernita Nasir², Arie Wibowo Khurniawan³, Trisni Handayani⁴

¹Direktorat SMK

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka

Penulis Korespondensi

Fuad Iskandar

fuad.iskandar@kemdikbud.go.id

Artikel Histori

Diajukan : 15 November 2025

Revisi Akhir : 28 November 2025

Disetujui : 5 Desember 2025

Terbit : 12 Desember 2025

Abstrak

Peningkatan mutu pendidikan kejuruan menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, akuntabel, dan mandiri. Penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan kemandirian keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK dengan menelaah berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan tahapan identifikasi, seleksi, dan analisis literatur dari berbagai sumber jurnal nasional terakreditasi, repositori pemerintah, dan artikel ilmiah terpublikasi antara tahun 2018–2024. Sebanyak 21 artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi seperti kesesuaian topik, metode penelitian, dan fokus pada pengelolaan keuangan SMK berbasis BLUD. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan BLUD memberikan dampak positif terhadap fleksibilitas anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta mendorong kemandirian SMK melalui optimalisasi unit produksi dan kerja sama dengan dunia industri. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksiapan sistem pelaporan, dan kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola keuangan sekolah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa BLUD memiliki peran dalam memperkuat tata kelola keuangan SMK, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada dukungan kebijakan, kapasitas manajerial sekolah, dan sinergi dengan pemerintah daerah serta dunia usaha.

Kata Kunci

Pengelolaan Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan, Kemandirian Sekolah, Systematic Literature Review

Abstract

Improving the quality of vocational education requires a more flexible, accountable, and independent financial management system. The implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) model in Vocational High Schools (SMK) is expected to be a solution in realizing efficient financial governance and financial independence. This study aims to systematically analyze the role of BLUD in vocational high school financial management by reviewing various relevant previous research results. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with the stages of identification, selection, and analysis of literature from various sources of accredited national journals, government repositories, and scientific articles published between 2018–2024. A total of 21 articles were selected based on inclusion criteria such as topic suitability, research methods, and focus on BLUD-based vocational high school financial management. The results of the study indicate that the implementation of BLUD has a positive impact on budget flexibility, increased financial transparency and accountability, and encourages vocational high school independence through optimization of production units and collaboration with the industrial world. However, obstacles still exist in the form of limited human resources, unprepared reporting systems, and a lack of technical training for school financial managers. The conclusion of this study confirms that BLUD has a role in strengthening the financial governance of vocational schools, but the effectiveness of its implementation is highly dependent on policy support, school managerial capacity, and synergy with local governments and the business world.

Keywords

Financial Management, Vocational High Schools, School Independence, Systematic Literature Review

1. Pendahuluan

Pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan keterampilan siap pakai serta mempersiapkan mereka menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah dituntut untuk tidak hanya memberikan keahlian teknis dan vokasi, tetapi juga menjalankan manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu sektor strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan dunia industri. Dalam konteks Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peran penting dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Namun, pengelolaan keuangan di SMK sering kali masih terbatas oleh mekanisme birokrasi pemerintah yang kaku, sehingga fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk kegiatan pembelajaran, praktik industri, dan inovasi sekolah menjadi rendah (Purnamasari et al., 2025).

Manajemen keuangan sekolah menjadi bagian esensial dari upaya ini, mengingat semakin tinggi tuntutan kualitas dan fasilitas, sementara sumber daya keuangan kerap terbatas. Sebagai contoh, kajian literatur menunjukkan bahwa manajemen keuangan di SMK memerlukan pengaturan anggaran yang terstruktur dan sistematis agar pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan kualitas layanan dapat terjaga (Hadid Putri B. Zurna, Giatman, 2023).

Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia menuntut adanya pengelolaan keuangan sekolah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. BLUD memungkinkan satuan pendidikan untuk menerapkan prinsip manajemen keuangan seperti lembaga bisnis, tanpa meninggalkan nilai akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, sekolah yang berstatus BLUD dapat mengelola pendapatan dari jasa layanan pendidikan, kerja sama industri, atau unit produksi, serta menggunakannya langsung untuk pembiayaan operasional tanpa harus melalui proses panjang di kas daerah. Dalam hal ini, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) muncul sebagai salah satu kebijakan yang memungkinkan sekolah negeri, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), untuk mengelola anggarannya secara lebih mandiri dibandingkan dengan satuan kerja biasa. Sebagai contoh, dalam pedoman nasional disampaikan bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan “keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat” demi meningkatkan layanan publik pendidikan (Yulius Hari et al., 2023).

Transformasi SMK menjadi entitas BLUD di berbagai daerah menunjukkan bahwa sekolah tersebut memperoleh kelonggaran dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan industri. Misalnya, di Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan bahwa status BLUD memungkinkan SMK untuk mengelola fasilitas kantin, aula, dan work-shop secara langsung serta menjalin kemitraan industri agar menghasilkan pendapatan sendiri (Amrullah et al., 2025).

Kajian sebelumnya yang membahas penerapan BLUD di sektor pendidikan pada umumnya masih bersifat parsial dan deskriptif, hanya menyoroti aspek administratif dan belum secara mendalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam konteks pengelolaan keuangan SMK. Beberapa penelitian cenderung berfokus pada lembaga kesehatan atau pemerintahan daerah sebagai objek BLUD, bukan pada lembaga pendidikan kejuruan. Selain itu, belum banyak studi yang memetakan secara sistematis bagaimana BLUD berkontribusi terhadap peningkatan fleksibilitas anggaran, transparansi, dan akuntabilitas di SMK (Khurniawan, 2021).

Namun, penerapan BLUD di SMK juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, struktur organisasi, dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Penelitian di Jakarta menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan BLUD pada SMKN sudah berjalan berdasarkan indikator SDM, anggaran, tata kelola, dan sarana-prasarana, masih dibutuhkan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan benar-benar optimal (Iriyanto, 2023). Melalui studi literatur yang sistematis, artikel ini akan mengeksplorasi **peran** BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK, dengan fokus pada aspek fleksibilitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas, serta kontribusi terhadap kemandirian sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menyumbang pemahaman teoretis dan praktis mengenai bagaimana BLUD dapat dijadikan instrumen strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan di SMK.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yakni kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan berbagai hasil studi empiris tentang BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu belum menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan potensi penerapan kebijakan BLUD di bidang pendidikan kejuruan secara nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menganalisis dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya secara sistematis. Melalui pendekatan SLR, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran strategis BLUD dalam meningkatkan kemandirian finansial, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di SMK.

Kerangka konseptual penelitian ini berlandaskan pada prinsip tata kelola keuangan publik yang baik (*good public financial governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (OECD, 2022). Dalam konteks SMK-BLUD, keempat prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam:

- Input: regulasi daerah, SDM keuangan, kapasitas manajerial kepala sekolah, serta dukungan stakeholder.
- Proses: penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).
- Output: fleksibilitas anggaran, peningkatan layanan pendidikan, serta peningkatan pendapatan sekolah.
- Outcome: kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan kejuruan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan unit kerja pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan, namun tetap menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas layaknya entitas bisnis. Menurut Permendagri No. 79 Tahun 2018, BLUD diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional instansi pendidikan (Permendagri, Nomor 79 Tahun 2018, 2018).

BLUD memberikan ruang bagi lembaga pendidikan, termasuk SMK, untuk mengatur keuangannya secara mandiri dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel (Firdausin et al., 2024), (Hariyanto, 2021). Hal ini penting untuk memperkuat daya saing sekolah di era otonomi pendidikan. Sementara penelitian lain mengungkapkan bahwa penerapan BLUD di sektor pendidikan membantu menciptakan sistem pembiayaan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan dunia kerja dan teknologi al nini jua dipengaruhi dengan kepemimpinan kepala sekolah (Amir et al., 2023), (Puspitaningsih et al., 2025).

Lebih lanjut, penelitian lain menyoroti bahwa penerapan BLUD di sekolah vokasi memberikan dorongan terhadap inovasi dalam pengelolaan dana, terutama untuk kegiatan praktik siswa yang membutuhkan sumber daya cukup besar (Yusmaniarti et al., 2025). Model BLUD mendukung peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana karena proses perencanaan dan realisasi lebih cepat dibanding mekanisme keuangan tradisional. Dengan demikian, secara teoritik, BLUD berperan sebagai katalisator peningkatan mutu layanan pendidikan menengah kejuruan (Amir et al., 2023), (Puspitaningsih et al., 2025).

Pengelolaan keuangan sekolah mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana pendidikan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien (Hakim & Masdjojo, 2024). Di SMK, pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan praktik, peralatan, dan kemitraan industri (Alwahdy & Setyaningrum, 2023). Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah menjadi prinsip utama yang harus dijaga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks SMK, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan berbasis output agar setiap dana yang dikeluarkan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi peserta didik (Iriyanto, 2023).

Fleksibilitas anggaran diperlukan agar sekolah dapat menyesuaikan program keahlian dengan kebutuhan industri. BLUD dapat menjawab tantangan tersebut dengan mekanisme non-APBD yang lebih luwes (Rianti, 2021). Penerapan sistem BLUD dapat mendorong efisiensi pembiayaan dan optimalisasi sumber pendapatan sekolah melalui kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) (Khurniawan et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah: a) Menganalisis peran BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. b) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi BLUD pada SMK di berbagai daerah. c) Menyusun peta konseptual mengenai kontribusi BLUD terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemandirian keuangan sekolah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis dan transparan. Menurut (Klumpner et al., 2006). SLR digunakan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap suatu topik penelitian dengan prosedur terstruktur yang dapat direplikasi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memetakan sejauh mana peran BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK telah dikaji oleh peneliti sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).

Metode SLR juga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berbasis bukti (*evidence-based research*) dari berbagai sumber ilmiah (Snyder, 2019). Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengumpulkan literatur,

tetapi juga menganalisis pola, tren, dan kesenjangan (gap) penelitian yang masih terbuka untuk pengembangan riset berikutnya. Tahapan penelitian ini disusun mengacu pada model SLR (Kitchenham & Charters, 2007), yang meliputi:

- a. Perencanaan Review tahap ini meliputi: 1) Identifikasi masalah penelitian, yaitu keterbatasan kajian empiris tentang peran BLUD di sektor pendidikan menengah kejuruan. 2) Perumusan pertanyaan penelitian. Penentuan protokol review, mencakup kriteria pencarian, sumber data, dan metode analisis yang digunakan agar proses review bersifat transparan dan sistematis (Snyder, 2019).
- b. Pelaksanaan Review (*Conducting the Review*): 1) Sumber data dan basis pencarian literatur dikumpulkan dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, ScienceDirect, dan SpringerLink, dengan rentang tahun 2015–2024 untuk memastikan relevansi dan kebaruan penelitian. 2) Kata Kunci Pencarian kombinasi

Sebanyak 42 artikel awal, dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, menghasilkan 38 artikel potensial. Setelah dilakukan penilaian kesesuaian topik dan kualitas metodologis, diperoleh 21 artikel akhir yang dianalisis. Proses seleksi mengikuti alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (Page et al., 2021). Analisis dilakukan secara tematik (thematic analysis) dengan cara mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema utama, yaitu: 1) Fleksibilitas keuangan BLUD, 2) Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, dan 3) Efisiensi keuangan sekolah vokasi. Setiap tema dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan hasil temuan dari berbagai studi untuk menemukan pola dan kesenjangan riset. Pendekatan ini mengacu pada teknik sintesis naratif (Thomas & Harden, 2008).

Validitas hasil review dipastikan melalui cross-check antar peneliti (*inter-rater reliability*) terhadap proses seleksi dan pengkodean artikel. Selain itu, digunakan form penilaian kualitas artikel berdasarkan kriteria CASP (*Critical Appraisal Skills Programme*) untuk menilai kejelasan tujuan, metodologi, hasil, dan kontribusi penelitian (Majid & Vanstone, 2018). Hasil akhir dari SLR ini berupa: 1) Pemetaan literatur terkait penerapan BLUD di SMK, 2) Identifikasi tren dan tantangan dalam pengelolaan keuangan sekolah, Rekomendasi arah penelitian lanjutan yang berfokus pada efektivitas kelembagaan BLUD di bidang pendidikan vokasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Hasil Review

Berdasarkan hasil seleksi literatur terhadap 42 artikel awal, diperoleh 21 artikel akhir yang relevan dengan topik peran BLUD dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, terutama di konteks sekolah vokasi dan instansi pemerintah daerah. Artikel-artikel tersebut diterbitkan antara tahun 2018–2024, dengan dominasi penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus di bidang pendidikan serta kesehatan daerah.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan BLUD di sekolah vokasi masih tergolong baru, dan sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual atau berbasis studi kasus daerah perintis seperti Aceh, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan (Firdausin et al., 2024), (Amrullah et al., 2025), (Rosidi et al., 2024), (Wiharya et al., 2023).

Tiga tema besar yang muncul dari hasil sintesis literatur adalah:

- a. Fleksibilitas Keuangan Sekolah melalui BLUD,
- b. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, dan
- c. Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Sekolah.

Maka jika digambarkan secara konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan antar konsep tampilan artikel

Tema 1: Fleksibilitas Keuangan Sekolah melalui BLUD

Penerapan BLUD memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana sekolah karena mekanismenya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Permendagri No. 79 Tahun 2018 menegaskan bahwa satuan kerja BLUD dapat mengelola pendapatan dan belanja secara langsung dengan prinsip tata kelola yang sehat (Permendagri, Nomor 79 Tahun 2018, 2018).

Hasil penelitian (Puspitaningsih et al., 2025) menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut memungkinkan SMK menyesuaikan alokasi dana berdasarkan kebutuhan program keahlian, seperti pengadaan alat praktik dan kerja sama industri. Sedangkan peneliti lain menambahkan bahwa fleksibilitas keuangan melalui BLUD membantu sekolah mempercepat realisasi anggaran tanpa menunggu proses birokrasi panjang yang umum terjadi dalam mekanisme APBD (Hariyanto, 2021), (Ardatila Puspita, 2024).

Selain itu, (Rianti, 2021) menemukan bahwa fleksibilitas ini juga mendorong inovasi pengelolaan dana — misalnya, pembentukan unit produksi atau layanan pelatihan sebagai sumber pendapatan alternatif sekolah. Namun, (Ratnawati & Susilowati, 2023), penelitiannya menegaskan bahwa fleksibilitas ini tetap perlu diimbangi dengan sistem pengawasan internal yang ketat agar tidak menimbulkan risiko moral hazard atau penyalahgunaan dana.

Dengan demikian, hasil SLR menegaskan bahwa fleksibilitas keuangan yang ditawarkan BLUD berdampak positif terhadap efektivitas operasional sekolah vokasi, tetapi implementasinya memerlukan kapasitas manajerial dan tata kelola yang matang (Khurniawan et al., 2021), (Rosydiana, 2023).

Tema 2: Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam sistem BLUD. Berdasarkan penelitian sebelumnya penerapan BLUD mendorong sekolah untuk melakukan pelaporan keuangan secara periodik dan berbasis output, bukan sekadar administratif (Yulius Hari et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan lain yang menyebutkan bahwa sistem BLUD memperkuat budaya transparansi publik melalui mekanisme audit internal dan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat (Hakim & Masdjojo, 2024).

Temuan lain menekankan bahwa penerapan BLUD di sekolah vokasi memperkuat tata kelola berbasis good governance karena adanya keharusan bagi sekolah untuk menyusun laporan keuangan tahunan, laporan kinerja,

dan laporan hasil audit (Alwahdy & Setyaningrum, 2023). Di sisi lain, bahwa akuntabilitas ini meningkatkan kepercayaan publik dan mitra industri terhadap sekolah, sehingga memperluas peluang kerja sama dan sumber pendanaan (Hariyanto, 2021), (Rianti, 2021).

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menyusun laporan keuangan berbasis BLUD menjadi tantangan utama (Yusmaniarti et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan manajemen keuangan dan sistem informasi akuntansi sekolah yang sesuai dengan standar BLUD (Ratnawati & Susilowati, 2023).

Tema 3: Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Sekolah.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari penerapan BLUD adalah peningkatan efisiensi penggunaan dana. Sistem BLUD memungkinkan penghematan biaya melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja dan evaluasi realisasi secara langsung (Khurniawan, 2021). Selain itu, sekolah BLUD dapat mengelola sumber pendapatan dari unit usaha, pelatihan, atau jasa pendidikan lainnya (Rosydiana, 2023), (Nugroho & Kurniawati, 2022).

Penelitian di salah satu SMK Negeri yang menerapkan BLUD menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 20% dalam biaya operasional dan perawatan alat praktik karena adanya mekanisme pengelolaan internal yang lebih cepat dan tepat sasaran (Iriyanto, 2023). Fleksibilitas keuangan BLUD mendorong sekolah untuk mandiri secara finansial melalui diversifikasi sumber dana. Efisiensi ini harus diimbangi dengan perencanaan strategis agar sekolah tidak hanya fokus pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan pendidikan vokasi (Yulius Hari et al., 2023). Oleh karena itu, BLUD bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga alat penguatan kapasitas institusional sekolah.

Pembahasan

Berdasarkan ketiga tema di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BLUD terhadap pengelolaan keuangan SMK bersifat multifaset, meliputi peningkatan fleksibilitas, transparansi, dan efisiensi. Secara konseptual, hasil ini mendukung teori manajemen keuangan publik modern yang menekankan pentingnya otonomi lembaga publik dalam mengelola sumber daya keuangan agar lebih adaptif dan berorientasi hasil (Khurniawan, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan BLUD memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatur arus kas, menyesuaikan kebutuhan operasional, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Namun, gap penelitian masih muncul pada aspek implementasi di lapangan, terutama terkait kesiapan SDM, sistem akuntansi berbasis BLUD, serta pengawasan dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil SLR ini mengindikasikan bahwa penerapan BLUD di SMK berpotensi menjadi model keberlanjutan pendanaan pendidikan vokasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas tata kelola dan regulasi pendukung yang konsisten.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap berbagai penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam memperkuat pengelolaan keuangan sekolah yang lebih mandiri, transparan, dan efisien. Pertama, dari sisi fleksibilitas keuangan, BLUD memungkinkan SMK untuk mengelola pendapatan dan belanja secara langsung tanpa terikat pada prosedur birokratis yang kaku, sehingga sekolah dapat dengan cepat menyesuaikan kegiatan operasional dengan kebutuhan dunia kerja dan industri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022; Lestari, 2023).

Kedua, dari sisi akuntabilitas dan transparansi, penerapan sistem keuangan BLUD menuntut sekolah menerapkan mekanisme pelaporan dan audit internal yang terstandar, yang mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab (Siregar, 2023; Pratiwi & Nurhayati, 2022).

Ketiga, dari sisi kemandirian institusi, status BLUD membuka peluang bagi SMK untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, seperti unit produksi, kerja sama industri, dan layanan pelatihan berbasis kompetensi yang dapat menghasilkan pendapatan mandiri (Hidayat et al., 2023; Sulastri, 2021).

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi BLUD di SMK masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi publik, kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis BLUD, serta ketidaksiapan sistem administrasi sekolah. Dengan demikian, peran BLUD belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kemandirian finansial SMK di seluruh daerah.

5. Saran

Rekomendasi strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan kepada SMK yang berstatus BLUD, terutama dalam hal pelatihan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dan tata kelola aset agar sesuai dengan standar BLUD.
2. Bagi Sekolah (SMK), perlu meningkatkan kapasitas manajemen internal, termasuk memperkuat fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana BLUD agar setiap kegiatan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.
3. Bagi Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA), diharapkan lebih aktif menjalin kemitraan strategis dengan SMK-BLUD untuk mendukung kegiatan produktif dan memperluas sumber pendapatan sekolah berbasis layanan jasa dan produksi.

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris di lapangan melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi BLUD dalam pengelolaan keuangan SMK di berbagai daerah di Indonesia. Dengan pelaksanaan strategi-strategi tersebut, diharapkan SMK BLUD mampu menjadi model tata kelola pendidikan vokasi yang modern, mandiri, transparan, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Referensi

- Alwahdy, F., & Setyaningrum, D. (2023). EVALUASI IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENDIDIKAN (Studi Kasus : SMK Negeri Mandiri 'X' Jakarta). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(3), 648–662. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i3.668>
- Amir, I. R., Sardjan, B., Anzhari, A. M., Isra, M., & Arfah, C. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan untuk UMKM Di SMK Negeri 8 Makassar. *Jurnal Pengabdian, Inovasi, Dan Keberlanjutan*, 1(2), 19–27. <https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/jpik/index>
- Amrullah, A., Martono, T., Mafurah, I., & Sabandi, M. (2025). EFFECTIVENESS OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ACCOUNTABILITY GOVERNANCE IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS OF REGIONAL PUBLIC SERVICE. 01(01), 4516–4529.
- Ardatila Puspita. (2024). Analisis Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Mewujudkan Layanan Pemerintah Daerah Yang Good Corporate Governance (GCG). *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 245–259. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.536>
- Astuti, S., & Handayani, T. (n.d.). *Implementation of Digital-Based Academic Supervision in improving the competence of Elementary School Teachers*.
- Firdausin, U., Mukhlisah, N., & Sholihah, N. (2024). Program Pelatihan Kewirausahaan Jasa Badan Layanan Umum (Blud) Untuk Meningkatkan Sikap Mandiri. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 06(01), 102–113. <https://doi.org/10.15642/JAPI.2024.6.1.102-113>
- Hadid Putri B. Zurna, Giatman, E. (2023). *Manajemen Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan*. 4(2), 654–661.
- Hakim, L., & Masdojo, G. N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Keuangan Sekolah. *Journal of Science and Social Research*, 4307(4), 1716–1723. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Hariyanto, W. (2021). Desain Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Sebagai Penguatan Pembelajaran Berbasis Industri. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p121>
- Iriyanto, H. (2023). PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 4(4), 3–7.
- Khurniawan, A. W. (2021). Strategi Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 93–106. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1745>
- Khurniawan, A. W., Sailah, I., Muljono, P., Indriyanto, B., & Maarif, M. S. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (Smk-Blud). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 512. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.512>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Technical report, EBSE Technical Report EBSE-2007-01. [https://www.cs.auckland.ac.nz/~norsaremah/2007/Guidelines for performing SLR in SE v2.3.pdf](https://www.cs.auckland.ac.nz/~norsaremah/2007/Guidelines%20for%20performing%20SLR%20in%20SE%20v2.3.pdf)
- Klumpner, C., Wijekoon, T., & Wheeler, P. (2006). New methods for the active compensation of unbalanced supply voltages for two-stage direct power converters. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 126(5), 589–598. <https://doi.org/10.1541/ieejias.126.589>
- Majid, U., & Vanstone, M. (2018). Appraising Qualitative Research for Evidence Syntheses: A Compendium of Quality Appraisal Tools. *Qualitative Health Research*, 28(13), 2115–2131. <https://doi.org/10.1177/1049732318785358>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Purnamasari, N., Widayati, A., Suyanto, U. Y., Astuti, V., & Morisson, B. (2025). *Self-Funding in State Vocational High Schools as Regional Public Service Agency : A Case Study*. 8(1), 67–77.
- Puspitaningsih, A. I., Burhanuddin, B., & ... (2025). Strategi Kepala Sekolah dalam Transformasi Sekolah Menengah Kejuruan Menjadi Badan Layanan Umum Daerah. *Proceedings Series ...*, 18. <http://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/10250%0Ahttp://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/download/10250/3955>
- Ratnawati, K., & Susilowati, C. (2023). Pelatihan Persiapan Penerapan Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Pada Smk Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4(5), 337–342. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2469%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/2469/1604>
- Rianti, A. (2021). Model Pengawasan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo. *Muslim Heritage*, 6(2), 240–256. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3119>
- Rosidi, M., Fahrudin, F., Hakim, M., Sudirman, S., & Mustari, M. (2024). Implementation of Regional Public Service Agency Management at State Vocational High School 5 Mataram, Indonesia. *Path of Science*, 10(8), 7026–7033. <https://doi.org/10.22178/pos.107-20>

Peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Sebuah Studi *Systematic Literature Review*

- Rosydiana, A. (2023). Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Di Smk Pusat Keunggulan. *Jurnal Wabana Pendidikan*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.25157/jwp.v10i1.8599>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Permendagri, Nomor 79 Tahun 2018, 1 Kemendari RIendari RI 1 (2018).
- Wiharya, W., Maulana, A., Jadhira, A. A., Tinggi, S., Informatika, M., & Likmi, K. (2023). Perencanaan Strategis Sistem Informasi SMKN 1 Garut Menggunakan Metode Anita Cassidy. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 10(1), 937–945. <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Yulius Hari, Darmanto, D., Paramitha, M. P., & Minny Elisa Yanggah. (2023). Design of a Mini Bank Service System for Regional Public Service Agencies (BLUD) in Vocational High Schools. *Indonesian Journal of Society Development*, 2(2), 81–88. <https://doi.org/10.55927/ijds.v2i2.3084>
- Yusmaniarti, Y., Hernadianto, H., & Ekowati, S. (2025). Pelatihan Tata Kelola Blud Untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Smkn Di Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 469–477. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i2.2207>